

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan karena memiliki banyak pulau, sekitar 17.506. Secara strategis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jembatan alami yang penting untuk perdagangan internasional dan hubungan antarnegara. Luas wilayah laut Indonesia mencapai sekitar 5,8 juta km², dengan garis pantai sepanjang 95.161 km, menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan kedua setelah Kanada dalam hal panjang garis pantai. Selain itu, negara ini memiliki lautan besar yang mencakup 3.257.357 km², yang akan menjadikan sektor perikanan menjadi sumber pendapatan bagi negara Indonesia. (Ramadhani et al., 2022).

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki area lautan yang luas dan sekaligus salah satu produsen ikan terbesar didunia. Ini membuktikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut menjadi tumpuan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama masyarakat pesisir sekaligus sumber pangan bagi masyarakat umum. Indonesia memiliki perairan laut seluas 6,4 juta km² dan memiliki kekayaan sumber daya ikan diperkirakan mencapai sebanyak 12,01 juta ton setiap tahunnya, dengan batas tangkapan ikan diizinkan kurang lebih 8,6 juta ton pertahun (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022). Selain itu, Indonesia menempati posisi sebagai produsen perikanan terbesar kedua didunia, setelah China (FAO, 2022)

Sektor perikanan memiliki potensi besar, terutama untuk masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Perikanan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena secara langsung berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Peran manusia dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini sangatlah penting, sebab keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan sangat bergantung pada mutu sumber daya manusia yang memanfaatkannya terutama para nelayan (Yusuf, 2023).

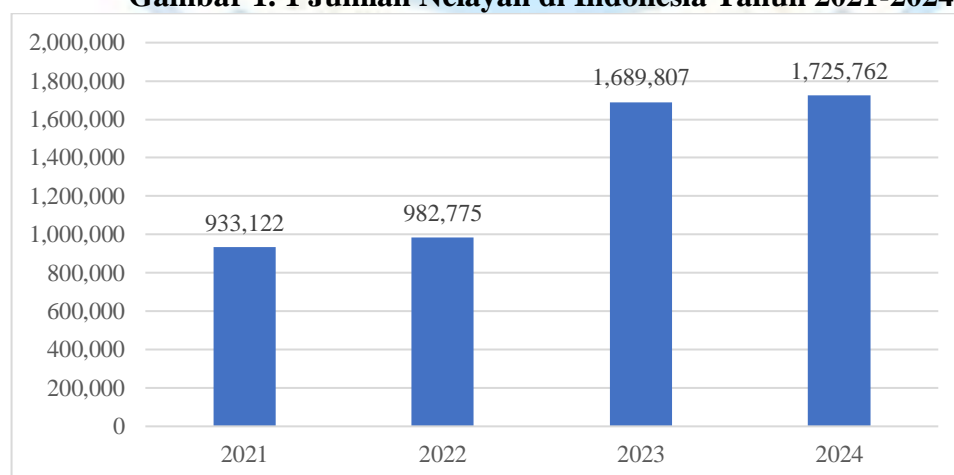
Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tidak hanya disebabkan oleh salah satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Menurut Kusnadi, terdapat dua faktor yang memengaruhi kemiskinan nelayan. Pertama faktor internal, meliputi rendahnya sumber daya manusia (SDM), kekurangan modal usaha, minimnya akses terhadap teknologi untuk penangkapan ikan, penjualan ikan dengan harga yang rendah, kesulitan dalam mengelola usaha penangkapan, tingginya ketergantungan pada aktivitas melaut, dan gaya hidup cenderung konsumtif menyebabkan kurangnya perhatian dalam merencanakan masa depan. Sisi lain yaitu faktor eksternal mencakup kebijakan pembangunan sektor perikanan yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional saja, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, kerusakan pada ekosistem pesisir dan laut, serta penyalahgunaan lahan mangrove dikawasan pesisir menjadi lahan untuk keperluan lain (Ginting, 2022).

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah memberdayakan masyarakat. Karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan memberdayakan masyarakat nelayan.

Pemberdayaan nelayan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial ekonomi, dan politik nelayan melalui pengelolaan potensi sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pembahasan mengenai pemberdayaan menjadi sangat penting karena dapat membantu mengatasi permasalahan utama yang dialami nelayan, seperti kemiskinan, ketertinggalan, dan ketimpangan (Setiawan, 2022).

Nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam menyediakan sumber daya perikanan yang menjadi sumber protein hewani bagi berbagai lapisan masyarakat. Namun, kenyataannya kesejahteraan nelayan masih tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi di sektor lainnya (Iskandar, 2023). Ini menunjukkan bahwa sektor perikanan membutuhkan dukungan dan intervensi dari pembuat kebijakan yaitu pemerintah, baik melalui penyediaan fasilitas ekonomi maupun penerapan regulasi mendukung. Maka dengan itu, nelayan dapat terus menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

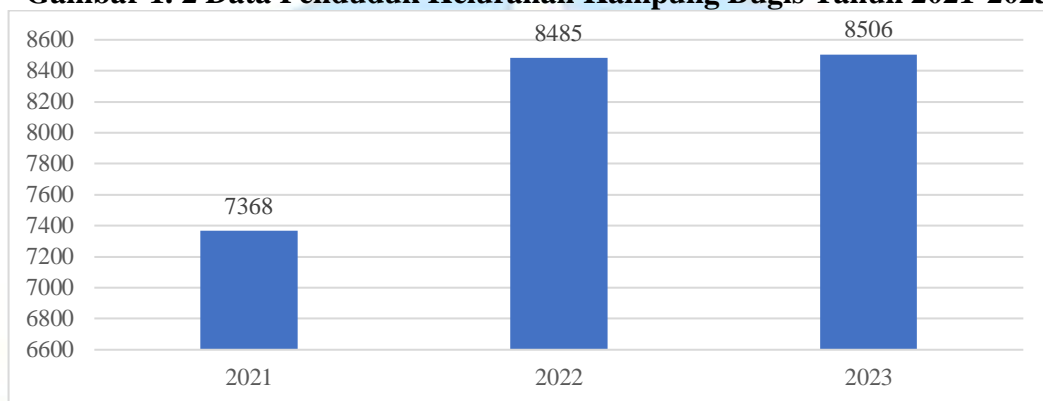
Gambar 1. 1 Jumlah Nelayan di Indonesia Tahun 2021-2024



Sumber: Kusuka KKP (2025)

Setiap tahun, jumlah nelayan di Indonesia meningkat. Dari 2021 hingga 2022, jumlah nelayan di Indonesia berkisar 1.689.807 sedangkan pada tahun 2023 berkisar 1.725.762. Jumlah ini, jelas bahwa nelayan Indonesia meningkat. Data berikut menunjukkan bahwa nelayan mendominasi Indonesia dengan jumlah yang paling besar.

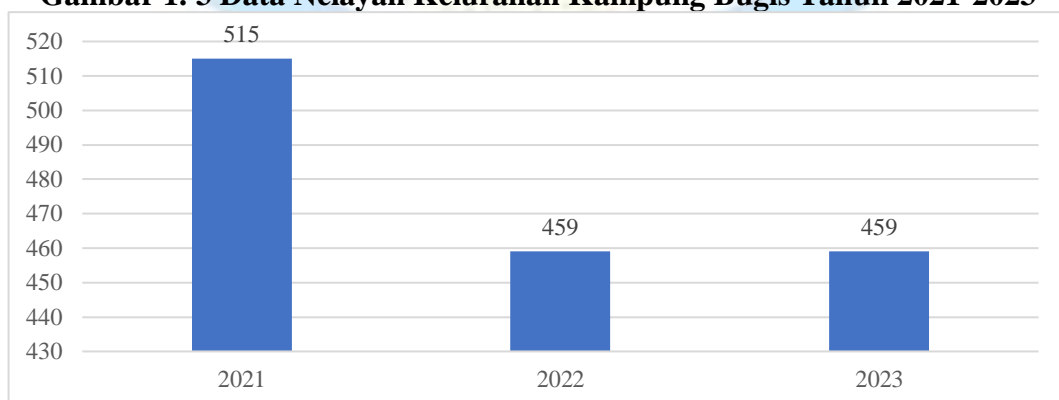
Gambar 1. 2 Data Penduduk Kelurahan Kampung Bugis Tahun 2021-2023



Sumber: Kelurahan Kampung Bugis (2025)

Berdasarkan Gambar 1.2 Jumlah Penduduk di Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota tahun 2021 – 2023 di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk di Kelurahan Bugis yang cukup signifikan dari tahun 2021 berjumlah 7.368 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 8.485 jiwa dan tahun 2023 meningkat menjadi 8.506 jiwa.

Gambar 1. 3 Data Nelayan Kelurahan Kampung Bugis Tahun 2021-2023



Sumber: Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota (2025)

Berdasarkan Gambar 1.3 Jumlah Nelayan di Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota 2021 – 2023 di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah nelayan di kelurahan Kampung Bugis yang cukup signifikan dari tahun 2021 berjumlah 515 jiwa tetapi tahun 2022 hingga 2023 turun menjadi 459 jiwa.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui terdapat peningkatan jumlah penduduk di Kelurahan Kampung Bugis tetapi terdapat penurunan jumlah nelayan di kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota. Penurunan ini memungkinkan terdapat faktor internal, meliputi rendahnya sumber daya manusia (SDM), kekurangan modal usaha, minimnya akses terhadap teknologi untuk penangkapan ikan, penjualan ikan dengan harga yang rendah, kesulitan dalam mengelola usaha penangkapan, tingginya ketergantungan pada aktivitas melaut, dan gaya hidup cenderung konsumtif menyebabkan kurangnya perhatian dalam merencanakan masa depan.

Tabel 1. 1 Data Penghasilan Nelayan di Kelurahan Kampung Bugis 2024

Daerah	Jumlah (Orang)	Penghasilan Rata-Rata Perbulan
Sungai Ladi	95	Rp1.000.000 - Rp3.000.000
Kampung Madong	96	Rp1.000.000 - Rp3.000.000
Kampung Bugis	97	Rp1.500.000 - Rp3.000.000

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2 Jumlah Nelayan Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota tahun 2021 – 2024 di atas, maka dapat diketahui bahwa penghasilan rata-rata nelayan adalah Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000 Perbulan ini menunjukkan bahwa nelayan di wilayah ini masih berada pada kategori pendapatan rendah hingga menengah, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang rentan dan

kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan. Pendapatan yang terbatas ini mengindikasikan bahwa nelayan masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini menjadi dasar penting bagi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dan pihak terkait untuk meningkatkan program pemberdayaan, akses bantuan sarana prasarana, pelatihan, dan dukungan pemasaran agar penghasilan nelayan dapat meningkat.

Dalam konteks masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pemberdayaan menjadi langkah penting mengingat mereka sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi perikanan, rendahnya tingkat pendidikan, serta fluktuasi hasil tangkapan akibat faktor cuaca dan perubahan ekosistem laut. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Menurut Mardikanto (2015), salah satu strategi adalah pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ini dicapai melalui nelayan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri sehingga kesejahteraan nelayan meningkat secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, telah melaksanakan program pemberdayaan yang diberi nama Pengelolaan Perikanan Tangkap guna meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan. Program pemberdayaan memiliki kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil. Program pemberdayaan

masyarakat mencakup wilayah yang menjadi fokus implementasi program ini adalah Sungai Ladi, Kampong Madong dan Kampung Bugis yang termasuk kedalam Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kelurahan Kampung Bugis merupakan daerah yang dikenal sebagai dengan mata pencaharian utama di sektor perikanan, di mana banyak warganya bergantung pada hasil laut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 1. 2 Program Pemberdayaan

No.	Wilayah	Program
1	Kampong Madong	Program Pelatihan Mesin Perikanan
2	Sungai Ladi	Program Pelatihan Mesin Perikanan
3	Kampung Bugis	Bantuan Alat Tangkap

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang meluncurkan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kampung Madong dan Sungai Ladi dengan memberikan Pelatihan Mesin Perikanan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengoperasikan dan merawat mesin perikanan, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan penangkapan ikan. Adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu mengelola alat tangkap dengan lebih baik, tetapi juga dapat mengembangkan usaha perikanan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, di tahun yang sama, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang juga mengadakan program pelatihan mesin di wilayah Kampung Bugis, dengan memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan setempat.

Tabel 1. 3 Data Bantuan Alat Tangkap Kampung Bugis

No.	Jenis Bantuan	Volume
1	Jaring Apollo	64 Pcs
2	Kawat Bubu	9 Roll
3	Bubu Ketam	141 Buah
4	Waring Tangkul Udang	4 Kg
5	Jala Udang	1 Pcs

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang (2025)

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang memberikan bantuan berupa jaring apollo, kawat bubu, bubu ketam, waring tangkul udang, dan jala udang. Dengan adanya bantuan alat tangkap ini, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat, serta sumber daya perikanan tetap terjaga keberlanjutannya. Berikut tabel data penerima bantuan alat tangkap di Kampung Bugis

Tabel 1. 4 Data Penerima Bantuan Alat Tangkap di Kampung Bugis

No.	Nama	Jenis Bantuan	Volume
1	M. Azmi	Jaring Apollo	8 Pieces
2	Zulkifli	Kawat Bubu	3 Roll
3	Zulinizar	Jaring Apollo	8 Pieces
4	Kurniadi Putra	Kawat Bubu	3 Roll
5	Mahmud	Kawat Bubu	3 Roll
6	Romius	Jaring Apollo	8 Pieces
7	Ridwan	Bubu Ketam	47 Buah
8	Nurizam	Bubu Ketam	47 Buah
9	Abdul Kahar Jumat	Jaring Apollo	8 Pieces
10	Jamal Asik	Waring Tangkul Udang	4 kg
11	M. Nasir	Jaring Apollo	8 Pieces
12	Wahyudi	Jaring Apollo	8 Pieces
13	Hapsah	Jaring Apollo	8 Pieces
14	Tri Kurniawan	Bubu Ketam	47 Buah
15	Rohmat	Jaring Apollo	8 Pieces
16	Nurahman	Jala Udang	1 Pieces

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang (2025)

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa penerima bantuan alat tangkap yang diberikan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang memberikan bantuan berupa jaring apollo, kawat bubu, bubu ketam, waring tangkul udang, dan jala udang. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka, sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi selama melakukan aktivitas penangkapan ikan. Program ini merupakan langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui kombinasi program pemberdayaan dan pelatihan ini, diharapkan masyarakat di Tanjungpinang dapat lebih mandiri dan berdaya saing dalam sektor perikanan.

Fenomena yang melatarbelakangi kajian ini adalah masih adanya tantangan yang dihadapi oleh nelayan setempat, seperti keterbatasan alat tangkap yang modern, kurangnya akses permodalan, serta minimnya pelatihan mengenai teknik perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak dari implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dan dampak terhadap kesejahteraan kelompok nelayan di Kelurahan Kampung Bugis.

Menurut Tiaraputri dan Diana dalam (Arkham et al., 2023) Kata "pengelolaan" mengandung arti pembangunan. Dalam hal pengelolaan sumber daya ikan, ini berarti melakukan upaya untuk meningkatkan dan meningkatkan kinerja sehingga tujuan mencapai kemakmuran rakyat dapat dicapai. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi adalah bagian dari pengelolaan sumber

daya perikanan untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan adalah wajib hukum.

Regulasi perikanan dan pembagian sumber daya ikan adalah cara pemerintah menjalankan tanggung jawab ini. Sumber daya ikan adalah sumber daya yang dapat diperbarui secara alamiah melalui proses pengembangbiakan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur cara pemanfaatannya untuk memastikan keberadaannya dan keberlanjutannya.

Hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan salah satu peraturan yang dibentuk oleh menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2024 mengenai Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini mengatur tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks pemberdayaan nelayan, peraturan ini memberikan dasar hukum untuk memberikan fasilitas, dorongan, dan bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Ini sangat relevan sebagai landasan pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang di tingkat kelurahan seperti Kampung Bugis.

Penelitian ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Meskipun fokusnya lebih teknis pada pengelolaan alat tangkap, pelaksanaan aturan ini juga berdampak pada pemberdayaan nelayan melalui pengaturan yang mendukung keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan, yang menjadi bagian

dari program pemberdayaan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), menetapkan bahwa pengelolaan perikanan sangat penting.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Yang Dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Studi Kasus Kelurahan Kampung Bugis” guna memberikan gambaran mengenai dampak pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2024 dan aturan menteri kelautan dan perikanan nomor 36 tahun 2023 di kelurahan Kampung Bugis, Tanjungpinang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Studi Kasus Kelurahan Kampung Bugis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi program pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang studi kasus kelurahan Kampung Bugis.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan formal yang dapat digunakan untuk merumuskan implementasi teoritis pedoman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk ilmu pemerintahan, khususnya, dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan peraturan. Penelitian ini diharapkan untuk berkontribusi dan wawasan untuk mengembangkan ilmu di bidang ilmu pemerintahan. Selain itu, dapat disediakan untuk para peneliti berikutnya dari berbagai bidang informasi tentang posisi penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan peraturan kementerian kelautan dan perikanan yang berhubungan dengan bagaimana dampak pelaksanaan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2024 dan nomor 36 tahun 2023 di kelurahan Kampung Bugis yang bisa juga bermanfaat bagi beberapa pihak seperti, berikut:

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait

Bagi pemerintah dan instansi terkait dapat dijadikan sebagai saran untuk pemantauan serta pelaksanaan dalam peraturan kementerian dan juga peningkatan penegakan hukum.

2. Bagi kelompok nelayan dan juga nelayan tradisional di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan, wawasan dan juga informasi yang bermanfaat bagi kelompok nelayan serta nelayan tradisional Kampung Bugis Tanjungpinang Kota. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat nelayan.

3. Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dan akademisi dapat dijadikan sebagai sarana informasi mengenai data-data yang berkaitan dengan dampak dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang pada Kelompok Nelayan di Kelurahan Kampung Bugis, Tanjungpinang Kota.